

# Efektivitas Implementasi *Green Financing* Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung

Oleh:

Tia Yuliawati<sup>1</sup>, Asni Mustika Rani<sup>2</sup>, Allya Roosallyn Assyofa<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung*  
Email: <sup>1</sup> [tia.yuliawati@unisba.ac.id](mailto:tia.yuliawati@unisba.ac.id), <sup>2</sup> [asnimustika@unisba.ac.id](mailto:asnimustika@unisba.ac.id),  
<sup>3</sup> [allyaroosallyn@unisba.ac.id](mailto:allyaroosallyn@unisba.ac.id)

## ABSTRAK

*Green financing* merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan dengan skema *green financing*, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi skema pembiayaan *green financing* bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode *descriptive survey*. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pembuat kebijakan pembiayaan *green financing* dan wawancara dengan pelaku UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung selaku peminjam/nasabah Program Pembiayaan *Green Financing* dengan bantuan kuesioner agar pertanyaan dalam wawancara lebih sistematis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *proportionate random sampling*, dimana dari jumlah populasi sebanyak 84 unit usaha dan dengan taraf kesalahan sebesar 10% maka sampel yang diambil adalah sebanyak 45 unit usaha UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung. Target jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan pengetahuan baru mengenai efektifitas penerapan skema pembiayaan *green financing* bagi UMKM di Kota Bandung dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penerapan skema pembiayaan *green financing*.

Kata Kunci: *Green Financing*, Pembiayaan, UMKM

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada bagaimana cara memajukan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat adalah Kota Bandung. Berikut data jumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2010–2015:

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Bandung Tahun 2010-2015**

No.	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Mikro	3.649	3.827	3.921	4.115	4.301	4.527
2	Kecil	301	325	337	357	372	390
3	Menengah	271	273	273	274	276	281
<b>Jumlah</b>		<b>4.221</b>	<b>4.425</b>	<b>4.531</b>	<b>4.746</b>	<b>4.948</b>	<b>5.198</b>

Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015

Salah satu UMKM sektor industri pengolahan di Kota Bandung yang paling dikenal adalah sektor industri pengolahan alas kaki yang berada di daerah Cibaduyut. Berikut data jumlah unit usaha dan jumlah penyerapan tenaga kerja sentra industri alas kaki Cibaduyut dari tahun 2012-2015:

**Tabel 1.2 Data Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut Tahun 2012-2015**

Sentra Industri	Potensi	2012	2013	2014	2015
Sentra Sepatu Cibaduyut	Jumah Unit Usaha	867	844	840	844
	Jumlah Tenaga Kerja	3613	3590	3570	3590

Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015

Berdasarkan hasil survei awal kepada para pelaku UMKM sektor industri pengolahan alas kaki yang berada di daerah Cibaduyut diketahui bahwa masih banyak UMKM yang mengalami kendala, baik kendala internal maupun eksternal. Diketahui kendala utama yang dirasakan oleh UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di daerah Cibaduyut adalah kesulitan modal usaha dengan persentase sebesar 38,84%.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan modal usaha bagi UMKM di Indonesia adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan dari perbankan. Dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah berupaya untuk mengimplementasikan terciptanya *green economy* di Indonesia. Agar tercipta *green economy*, lembaga keuangan terutama perbankan didorong untuk mengembangkan skema *green financing* dalam memberikan bantuan pembiayaan atau pinjaman modal usaha bagi seluruh pelaku usaha, termasuk bagi UMKM.

*Green financing* merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Dimana bank sebagai lembaga pemberi pinjaman dalam melakukan analisis kreditnya harus memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya terhadap kerusakan lingkungan. Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan dengan konsep *green financing*, peminjam dana atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus berusaha meminimalkan penggunaan energi serta harus memenuhi persyaratan 3R (*reduce, reuse, recycle*).

## 1.2. Identifikasi Masalah

*Green financing* merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Dimana bank sebagai lembaga pemberi

pinjaman dalam melakukan analisis kreditnya harus memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya terhadap kerusakan lingkungan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah untuk dapat menerima pembiayaan dengan konsep *green financing*, peminjam dana atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus berusaha meminimalkan penggunaan energi serta harus memenuhi persyaratan 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Mengingat Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dikhususkan di Kota Bandung dengan objek penelitian yaitu UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Daerah Cibaduyut.

Melalui penelitian ini ingin diketahui bagaimana efektivitas implementasi *green financing* sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM di Kota Bandung khususnya bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Daerah Cibaduyut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depannya mengingat tujuan dari kebijakan *green financing* ini sangat mulia yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektifitas implementasi skema pembiayaan *green financing* bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung?”

## **II. LANDASAN TEORI**

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan *green financing* sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha di Indonesia. Menurut Hühne, et al (2012), “*Green financing* adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan”.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Pricewaterhouse Coopers Consultants (PWC) (2013) mengenai implementasi *green financing* di China, diketahui bahwa untuk sektor perbankan, *green financing* didefinisikan sebagai produk dan jasa keuangan yang menggunakan pertimbangan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan kredit, merangsang lahirnya lingkungan investasi yang bertanggung jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan bagi proyek industri dan bisnis.

Sedangkan menurut Volz, et al (2015:2), *green financing* adalah semua bentuk investasi atau pinjaman yang mempertimbangkan aspek lingkungan guna meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Siregar, M.E. (2014) mengemukakan bahwa bisnis yang layak diberikan pembiayaan dengan skema *green financing* adalah bisnis yang dilakukan oleh debitur dalam konteks upaya pelestarian lingkungan, dimana debitur berkewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kutipan yang diambil dari *The President Post* (2012), terdapat perbedaan antara *Green Banking* dan *Green Financing*. *Green banking* mewajibkan bank mematuhi prinsip-prinsip 'keberkelanjutan' yang sering disebut dengan 3P (*Profit-People-Planet*), sedangkan *green financing* merupakan salah satu produk dari *green banking* yang mewajibkan bank untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan regulasi tentang lingkungan dan mendukung program-program perlindungan alam.

*Green Financing* di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. *Green Financing* terdiri dari dimensi:

- 1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
- 2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
- 3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
- 4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

### III. PEMBAHASAN

Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, dan berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Salah satu sumber pendanaan yang direncanakan mendukung tujuan program keuangan berkelanjutan adalah pendanaan dengan skema *green financing*, dimana skema pendanaan ini memotivasi para pengusaha untuk menerapkan indikator *green industry* di usaha mereka yaitu memenuhi indikator *reduce, reuse, dan recycle*.

Saat penelitian ini dilakukan, jumlah pengrajin alas kaki yang terdapat di Kota Bandung sebanyak 850 pengrajin yang tersentralisasi di Daerah Cibaduyut dan sekitarnya, yang meliputi pengrajin skala kecil dan menengah. Sedangkan jumlah pengrajin alas kaki yang terdaftar dalam Asosiasi Pengrajin Alas Kaki Indonesia

(APAI) sebanyak kurang lebih 85 pengrajin yang sudah memiliki usaha dengan merek/*brand* sendiri.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua APAI, aplikasi konsep *Green Industry* pada para pengrajin alas kaki di Kota Bandung memiliki beberapa kendala. Pertama, dari sisi fasilitas tempat usaha yang tidak memenuhi syarat *Green Industry*. Rata-rata para pengrajin alas kaki ini memproduksi di kawasan rumahnya sendiri. Rumahnya juga merupakan bengkel/*workshop* dimana mereka melakukan proses produksi. Kedua, aspek SDM. Diketahui bahwa pengrajin alas kaki di Kota Bandung tidak memiliki standar pendidikan yang cukup tinggi dimana rata-rata mereka hanya mengenyam pendidikan SD/SMP sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai usaha ramah lingkungan masih rendah. Ketiga, dari aspek teknologi. Tanpa ketiga aspek tersebut, konsep *Green Industry* sulit direalisasikan.

Pada UMKM sektor industri pengolahan alas kaki terdapat beberapa yang sudah menerapkan konsep *Green Industry* namun jumlahnya masih sangat sedikit. Contohnya pengrajin dengan merk dagang *Parker*, yang memproduksi alas kaki dengan bahan-bahan alami seperti serat bambu. Selain itu, pengrajin sudah menyediakan bengkel khusus yang terpisah dari tempat tinggalnya yang berada pada lingkungan yang bersih dan ruangnya tertata rapi. Pegawainya pun dituntut untuk bekerja dengan rapi dan bersih. *Green Industry* yang dijalankan para pengrajin masih sebatas hal tersebut. Sedangkan dalam penerapan sistem *reduce*, *reuse* dan *recycle*, UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung masih menerapkannya secara sederhana. Misalkan jika ada sisa-sisa atau limbah kulit sepatu yang tidak terpakai biasanya digunakan kembali untuk memproduksi souvenir, seperti dompet kecil, gantungan kunci dsb. Ada pula yang menjualnya kepada pengusaha yang khusus menampung limbah produksi untuk mereka olah kembali. Intinya konsep *Green Industry* ini dinilai masih sangat sulit untuk direalisasikan pada UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 responden. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa 7% dari jumlah responden mengaku mengetahui tentang skema pembiayaan “*Green Financing*” atau minimalnya pernah mendengar mengenai skema tersebut sedangkan 93% nya mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang skema pembiayaan “*Green Financing*”. Artinya pengetahuan masyarakat mengenai skema pembiayaan “*Green Financing*” ini masih sangat minim. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utamanya.

Selain itu, diketahui pula bahwa sebanyak 18% dari jumlah responden menyatakan tertarik untuk mendapatkan kredit dengan skema pembiayaan “*Green Financing*” sedangkan 82% nya menyatakan tidak atau belum tertarik dengan skema pembiayaan tersebut. Alasan kurangnya ketertarikan responden terhadap skema pembiayaan “*Green Financing*” karena mereka menganggap persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema tersebut cukup sulit untuk diterapkan pada usaha mereka, dimana salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah agar pelaku usaha dapat mendapatkan bantuan pembiayaan dengan skema tersebut yaitu dimana usaha mereka harus memenuhi indikator usaha berwawasan lingkungan yaitu menerapkan sistem *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.

### 3.1. Reduce

Berdasarkan hasil kuesioner, tanggapan responden mengenai proses *reduce* yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:

- Sebesar 60% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan lampu penerangan berupa LED yang hemat energi. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan lampu yang hemat energi pada kantor dan pabrik para responden secara nyata. Sedangkan sebesar 40% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan lampu penerangan berupa LED yang hemat energi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa ruangan yang masih menggunakan lampu bohlam biasa, selain itu ada beberapa responden yang merasa harga lampu LED terlalu mahal.
- Sebesar 20% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan proses pengeringan alami, seperti mengeringkan lem dengan bantuan sinar matahari atau diangin-anginkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya mesin pengering khusus di pabrik responden dan mereka mengandalkan cahaya matahari untuk mengeringkan produk mereka. Sedangkan sebesar 80% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan proses pengeringan alami, seperti mengeringkan lem dengan bantuan sinar matahari atau diangin-anginkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya mesin pengering di ruangan pabrik mereka. Penggunaan mesin pengering khusus dapat mempercepat proses produksi dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga banyak responden yang lebih memilih menggunakan mesin pengering khusus.
- Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk listrik. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan alat-alat elektronik yang hemat energi. Sedangkan sebesar 46,67% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk listrik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar alat untuk memproduksi menggunakan listrik dan dalam proses produksi sulit untuk mengatur penghematan. Selain itu mesin-mesin yang digunakan belum ada yang memiliki daya kecil, sehingga penggunaan energi listrik masih tergolong besar.
- Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk air. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan air yang tidak terlalu banyak karena mereka tidak menggunakan air dalam proses produksinya. Sedangkan sebesar 46,67% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk air. Hal tersebut dikarenakan sebagian material harus dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproduksi sehingga mereka banyak menggunakan energi untuk air.
- Sebesar 37,78% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan gas yang kurang, karena beberapa responden memang tidak menggunakan gas dalam proses produksinya, sehingga gas hanya digunakan untuk keperluan dapur. Sedangkan sebesar 62,22% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa alat produksi yang menggunakan bahan bakar gas dan dalam proses produksi sulit untuk mengatur penghematan.
- Sebesar 15,56% responden menyatakan setuju bahwa mereka sudah melakukan penggantian atau modifikasi peralatan/mesin dalam rangka meningkatkan efisiensi

produksi dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan peralatan atau mesin yang umur mesinnya masih tergolong muda. Sedangkan sebesar 84,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka sudah melakukan penggantian atau modifikasi peralatan/mesin dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan peralatan atau mesin yang sudah berumur puluhan tahun, dimana kapasitas produksi masih rendah dan menggunakan daya yang besar. Sulitnya mengganti peralatan/mesin dikarenakan modal yang kurang dan penjualan produk alas kaki saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis.

- Sebesar 26,67% responden menyatakan setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah/limbah dalam jumlah besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemilihan bahan baku yang dapat didaur ulang dan melakukan pengaturan bahan seefisien mungkin untuk mengurangi sampah sisa produksi. Sedangkan sebesar 73,33% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah/limbah dalam jumlah besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya tumpukan sampah/limbah sisa produksi di tempat produksi mereka.
- Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemilihan perlengkapan dan peralatan produksi yang dapat dilakukan proses isi ulang. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang. Hal tersebut dikarenakan sulitnya memilih peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang, banyak peralatan dan perlengkapan yang hanya bisa digunakan sekali pakai.
- Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemilihan perlengkapan dan peralatan produksi yang dapat dilakukan proses isi ulang. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Hal tersebut dikarenakan sulitnya memilih peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang, banyak peralatan dan perlengkapan yang hanya bisa digunakan sekali pakai.
- Sebesar 31,11% responden menyatakan setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli barang-barang yang kurang perlu. Hal tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya pengecekan gudang secara berkala untuk melihat *stock* material yang masih ada, sehingga mengurangi pembelian material secara berlebih. Sedangkan sebesar 68,89% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli barang-barang yang kurang perlu. Hal tersebut dikarenakan pembelian material secara massal harganya jauh lebih murah dibandingkan pembelian sedikit, sehingga banyak material yang tersisa atau disimpan jika nanti di kemudian hari diperlukan.

### 3.2. Reuse

Berdasarkan hasil kuesioner, tanggapan responden mengenai proses *reuse* yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:

- Sebesar 6,67% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menggunakan hasil sisa proses produksi untuk digunakan kembali menjadi bahan baku. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya produk sekunder yang dibuat dari hasil sisa produksi,

sehingga dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Sedangkan sebesar 93,33% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menggunakan hasil sisa proses produksi untuk digunakan kembali menjadi bahan baku. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sampah sisa produksi yang nantinya akan dibuang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada SDM yang dapat mengolah sisa produksi tersebut menjadi produk lain.

- Sebesar 100% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menggunakan hasil sisa proses produksi menjadi sumber energi, seperti energi api. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki pengetahuan dan alat untuk mengolah hasil sisa produksi menjadi sumber energi lain.
- Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan material bahan yang dapat digunakan kembali bukan kemasan sekali pakai. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali. Hal tersebut dikarenakan proses produksi kemasan tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahan sekali pakai seperti plastik.
- Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menjual atau memberikan sisa proses produksi kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan pengepul sisa produksi, dimana pengepul akan melakukan daur ulang secara massal. Sedangkan sebesar 75,56% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menjual atau memberikan sisa proses produksi kepada pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan pengepul yang mau diajak kerja sama jika sisa proses produksi kuantitasnya kecil, sehingga kebanyakan perusahaan langsung membuangnya saja.

### 3.3. *Recycle*

Berdasarkan hasil kuesioner, tanggapan responden mengenai proses *recycle* yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:

- Sebesar 31,11% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Hal tersebut ditunjukkan pemilihan bahan baku yang selektif dan hanya memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan sebesar 68,89% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang dapat didaur ulang memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan bahan biasa, dan mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memilih material yang memang bisa didaur ulang atau tidak.
- Sebesar 55,56% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku yang tidak mengandung zat berbahaya yang tidak merusak lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan pemilihan bahan baku yang selektif dan hanya memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan sebesar 44,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku yang tidak mengandung zat berbahaya yang tidak merusak lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketidaktahuan mereka mengenai komponen dari bahan baku yang mereka gunakan. Responden yang menyatakan kurang setuju hampir semua memang menjawab kurang paham mengenai kandungan bahan baku yang sebenarnya.



- Sebesar 55,56% responden menyatakan setuju bahwa proses produksi tidak menghasilkan polusi udara yang berbahaya (karbondioksida, metana, nitrogen, oksida dan gas rumah kaca lainnya). Hal tersebut dikarenakan proses produksi mereka memang tidak menghasilkan gas berbahaya. Sedangkan sebesar 44,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa proses produksi tidak menghasilkan polusi udara yang berbahaya (karbondioksida, metana, nitrogen, oksida dan gas rumah kaca lainnya). Hal tersebut ditunjukkan dengan ketidaktahuan mereka mengenai informasi polusi udara yang dihasilkan. Responden yang menyatakan kurang setuju hampir semua memang menjawab kurang paham mengenai polusi udara yang sebenarnya.
- Sebesar 75,56% responden menyatakan setuju bahwa proses produksi tidak menghasilkan limbah pencemar air yang berbahaya (kandungan logam berat dan lainnya). Hal tersebut dikarenakan proses produksi mereka memang tidak menghasilkan limbah air. Sedangkan sebesar 24,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa proses produksi tidak menghasilkan limbah pencemar air yang berbahaya (kandungan logam berat dan lainnya). Hal tersebut ditunjukkan dengan ketidaktahuan mereka mengenai informasi limbah air yang dihasilkan. Responden yang menyatakan kurang setuju hampir semua memang menjawab kurang paham mengenai limbah pencemar air yang sebenarnya.
- Sebesar 15,56% responden menyatakan setuju mereka melakukan daur ulang terhadap air sisa proses dan/atau air limbah. Hal tersebut dikarenakan dalam proses produksinya terdapat proses pembersihan air. Sedangkan sebesar 84,44% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka melakukan daur ulang terhadap air sisa proses dan/atau air limbah. Hal tersebut dikarenakan proses produksi mereka memang tidak menghasilkan limbah air.
- Sebesar 6,67% responden menyatakan setuju mereka melakukan konservasi air seperti membuat sumur resapan, biopori, penampungan air hujan atau upaya lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya penampungan air hujan di beberapa tempat produksi. Sedangkan sebesar 93,33% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka melakukan konservasi air seperti membuat sumur resapan, biopori, penampungan air hujan atau upaya lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat konservasi air, dan mereka merasa itu kurang penting untuk dilakukan.

Dari ketiga kriteria *Green Industry* yang diteliti pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa kriteria *Green Industry* pada sektor industri alas kaki di Kota Bandung memiliki rata-rata nilai sebesar 2,749 artinya implemementasi prinsip *Green Industry* pada sektor industri alas kaki di Kota Bandung termasuk dalam kategori kurang baik. Sehingga penerapan pembiayaan dengan skema *Green Financing* masih belum efektif untuk diterapkan di UMKM sektor industri alas kaki di Kota Bandung.

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi pembiayaan/pendanaan dengan skema *green financing* pada pengrajin di sektor industri alas kaki di Kota Bandung belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana hanya 7% dari jumlah responden sebanyak 45 UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung yang terdaftar di APAI mengaku mengetahui tentang skema pembiayaan *Green Financing*

atau minimal pernah mendengar mengenai skema tersebut. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama mengapa hal ini terjadi.

Berdasarkan hasil survey pula dapat diketahui 82% dari responden menyatakan tidak atau belum tertarik dengan skema pembiayaan tersebut. Alasan kurangnya ketertarikan responden terhadap skema pembiayaan *Green Financing* karena mereka menganggap persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema tersebut cukup sulit untuk diterapkan pada usaha mereka, dimana salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah agar pelaku usaha dapat mendapatkan bantuan pembiayaan dengan skema tersebut yaitu dimana usaha mereka harus memenuhi indikator usaha berwawasan lingkungan yaitu menerapkan sistem *reduce, reuse, dan recycle*.

Berdasarkan beberapa kendala yang terjadi dalam sosialisasi penerapan skema pembiayaan *green financing*, dapat dibuat beberapa tahapan yang dapat dilaksanakan, yaitu:

- 1) Peningkatan *supply* pendanaan Keuangan Berkelanjutan
- 2) Peningkatan *demand* bagi produk Keuangan Berkelanjutan
- 3) Pengawasan Implementasi Keuangan Berkelanjutan serta Koordinasi dengan Instansi Terkait

Penerapan masing-masing kebijakan diatas, memerlukan kajian yang menghasilkan kebijakan/regulasi khusus bagi penerapan yang efektif pada masing-masing bidang pengawasan terutama perbankan dan IKNB seperti kebijakan/regulasi manajemen risiko, target peningkatan portofolio pendanaan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, pelaporan serta pengawasan penerapan keuangan berkelanjutan dan penilaian tingkat kesehatan perbankan/IKNB. Dalam bidang pengawasan pasar modal, kebijakan/regulasi khusus yang diperlukan adalah kajian serta kebijakan/regulasi terkait mekanisme pelaporan keuangan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. dan Suhardjono. 2001. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- N. Höhne, N. Braun, H. Fekete, R. Brandsma, J. Larkin, M.G.J. den Elzen, M. Roelfsema, A.F. Hof, H. Böttcher. 2012. *Greenhouse Gas Emission Reduction Proposals and National Climate Policies of Major Economies*. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven
- OJK. 2014. *Pedoman Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan*. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

OJK. 2014. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Bank Indonesia. 2010. Kredit Perbankan. Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, Lampiran 14.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan. Jakarta: Bank Indonesia.

Volz, U., Böhnke, J., Knierim, L., Richert, K., Röber, G.-M., Eidt, V.2015. *Financing the Green Transformation-How to Make Green Finance Work in Indonesia*. Palgrave Macmillan UK.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)